

SKRIPSI

PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

**APPLICATION OF THE CONCEPT OF GOOD GOVERNANCE
IN THE GUNUNG SARI GOVERNMENT GOVERNMENT
WEST LOMBOK DISTRICT**



OLEH

ABDURAHMAN
NIM. 21511B0014S

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Jum,at

Tanggal : 20 Juli 2019

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



✓ **(Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP)**

NIDN. 0822048901



(Dedy Iswanto, ST, MM)

NIDN. 0818087901

Mengetahui,

Program Studi Administrasi Publik

Ketua



✓ **(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)**

NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE
DI PEMERINTAH KECAMATAN GUNUNG SARI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Oleh:

ABDURAHMAN
Nim. 21511B0014S

Pada Tanggal, 20 Juli 2019

Telah dipertahankan dengan baik di depan tim penguji :

1. **Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP** (_____)
NIDN. 0822048901
2. **Dedy Iswanto, MM** (_____)
NIDN.0818087901
3. **M. Taufik Rachman, SH, MH** (_____)
NIDN. 0813078902

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Des. Amil, MM
NIDN. 0831126204


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, SKRIPSI ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan/atau Doktor, baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tampak bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan daam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik merupakan pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 20 Juli 2019

Yang membuat pernyataan

 
Abdurahman
Nim. 21511B0014S

MOTTO

“SELALU ADA UNTUK MEREKA YANG JUGA ADA UNTUK SAYA”
“CINTA TIDAK PERNAH SALAH JIKA DARI HATI”



PERSEMBAHAN

Untuk orang tuaku yang tidak pernah lelah mendukung anaknya. Ini semua untuk kalian.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : Penerapan Konsep Good Governance Di Pemerintah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat). Skripsi ini sebagai sala satu syarat untuk mengerjakan program Starata-1 di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhamadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai taanpa bantuan dari berbagai pihak .karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasi kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. H.M. Junaidi, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP Selaku ketua Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhamdiyah Mataram, dan juga Selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan berbagai macam saran dan kritikan sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
4. Bapak Dedy Iswanto, MM, Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan meyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan ini saya ucapakan terima kasih.
5. Semua dosen pengajar program studi Administrasi Publik pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram atas didikan dan Ilmu pengetahuanya yang telah diberikan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.

6. Semua pegawai pegawai Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram yang telah banyak membantu selama ini.
7. Teman-teman mahasiswa regular sore angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Administrasi Publik saya mengucapkan trimakasih atas bantuanya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disusun dalam Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca pihak lain. yang berkepentingan dan dapat membri sumbangan bagi almater tercinta.

Mataram, Juli 2019

Penyusun,

Abdurahman
21511B0014S

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KECAMATAN GUNUNG SARI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abdurahman, Rahmad Hidayat, Dedy Iswanto

Kehidupan bernegara berkembang sangat pesat sesuai dengan tuntutan jaman. Ini juga tentu membuat aktivitas Negara juga semakin berkembang atau sangat kompleks. Begitu juga dengan aktivitas masyarakat di dalamnya. Berbicara pemerintahan pada masa sekarang, tentu tidak terlepas dari yang namanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau dikenal dengan *Good Governance*. Semua tingkatan pemerintahan mau disebut sudah menerapkan konsep terbaru ini. Istilah ini sudah sangat lazim disebut sebagai cerminan konsep pemerintah di era modern. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*) serta dokumentasi. Sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Gunung Sari telah melaksanakan prinsip good governance. Hal ini tercermin salah satunya dari peran camat tersebut sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi. Hasilnya adalah Kantor Kecamatan dianggap sudah mampu menjalankan perannya sebagai pimpinan. Hal ini dapat dilihat dari kajian aspek good governance yaitu Keputusan, Membangun Kerja Tim dan Memberi Motivasi.

Kata Kunci: Pemerintah Kecamatan, Good Governance.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE CONCEPT OF GOOD GOVERNANCE IN THE GUNUNG SARI GOVERNMENT GOVERNMENT WEST LOMBOK DISTRICT

Abdurahman, Rahmad Hidayat, Dedy Iswanto

The life of the state is growing very rapidly in accordance with the demands of the times. This also certainly makes the activities of the State also growing or very complex. Likewise with community activities in it. Speaking of government in the present, it certainly cannot be separated from what is called good governance or known as Good Governance. All levels of government want to be called already implementing this latest concept. This term has been very commonly referred to as a reflection of the concept of government in the modern era. This type of research is descriptive research with qualitative methods. The researcher used several data collection techniques, namely, observation and interviews as well as documentation. As for the data analysis technique using qualitative data analysis techniques, namely data collection, data reduction and conclusion drawing.

From the results of the study it can be concluded that the Gunung Sari District Office has implemented the principles of good governance. This is reflected in one of them from the role of the Camat as a leader who is reviewed in terms of decision making, in building teams, and in providing motivation. The result is that the District Office is considered capable of carrying out its role as leader. This can be seen from the study of aspects of good governance, namely decisions, building teamwork and giving motivation.

Keywords: District Government, Good Governance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep <i>Governance</i>	8
2.1.1 Definisi <i>Good Governance</i>	8
2.1.2 Indikator Kualitas <i>Governance</i>	9
2.1.3 Tahap Kinerja <i>Good Governance</i>	12
2.2 Karakteristik Pemimpin Yang Efektif	14
2.3 Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi	17
2.4 Pelayanan Publik	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Teknik Pemilihan Informan/Narasumber	25
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1 Jenis Data	26
3.4.2 Sumber Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
1. Metode Pengamatan (Observasi)	28
2. Metode Wawancara (Interview)	28
3. Metode Dokumentasi	29

3. 6 Teknik Analisis Data.....	30
1. Reduksi Data (Data Reduction)	31
2. Penyajian Data	31
3. Penarikan Kesimpulan	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah.....	33
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Deskripsi Peran Kantor Kecamatan Gunung Sari.....	49
4.2.2 Deskripsi Faktor Penghambat.....	55
4.3 Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan, lebih tepatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini adalah bentuk Negara dan system pemerintahan yang sudah disepakati, bahkan dalam pasal 37 ayat 5 UUD 1945 menegaskan bahwa “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Negara kesatuan adalah Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih pusat untuk di delegasikan. Ini tentu dengan sebutan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, sampai dengan pemerintah desa. Di semua tingkatan pemerintahan tersebut tentu diperlukan pemimpin yang tentunya dipilih secara demokratis.

Secara umum dilingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itu sehingga muncul istilah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya

keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut-pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.

Di kutip dari Hasibuan (2011), dimana menurut beliau Pimpinan atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha menciptakan hubungan yang baik diantara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, karena pimpinan merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Menciptakan hubungan yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintah tersebut.

Konsep pemerintahan terbaru dikenal dengan istilah *Good Governance* yang berarti Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Istilah ini sudah sangat lazim disebut sebagai cerminan konsep pemerintah di era modern. Tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) yang baik ini merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya globalisasi dengan tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keharusan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Kepemerintahan yang baik dalam konteksnya merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik tidak lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintah yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Selain itu dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Di Indonesia sendiri, tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mendorong segera terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan. Pemerintah kecamatan adalah pembangian wilayah administrative di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2018, kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Pada satu sisi, Pemerintahan kecamatan yang sebelumnya merupakan “perangkat wilayah”

dalam rangka azas desentralisasi dan pemerintahan desa yang sebelumnya merupakan unit pemerintahan terendah berada di bawah Pemerintahan Kecamatan (Sub Ordinasi), pada saat sekarang kedudukannya otonomi dan tidak bersifat sub ordinasi dengan Pemerintahan Kecamatan.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam pemerintahan kecamatan. Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Koeswara (2007:3), Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 Ayat (2), Camat adalah merupakan perangkat daerah yang dalam melakukan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau Wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kewenangan yang dijalankan oleh Daerah Kabupaten dan daerah kota begitu kompleks, maka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kewenangan tersebut Bupati/Wali kota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat, sebagai Pasal 126 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2002 tentang penjabaran Uraian Tugas jabatan Struktural dan fungsional pada Pemerintahan Kecamatan. Sebagaimana dalam penelitian ini pemerintahan Kecamatan Gunung Sari merupakan pemejangan tangan dari pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunung Sari merupakan salah satu kecamatan yang berada lingkup administrasi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini jumlah desa yang dimiliki oleh Kecamatan Gunung Sari dengan jumlah 12 desa. Mayoritas penduduk desa ini adalah suku Sasak.

Pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin dalam perangkat daerah. Dimana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 UU no 23

tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari a) sekretariat daerah, b) sekretariat DPRD, c) inspektorat, d) dinas, e) badan dan f) kecamatan.

Melihat begitu pentingnya pemerintah kecamatan dengan kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai. Diharapkan dengan penerapan prinsip good governance akan mengantarkan pemerintah kecamatan menjadi lebih baik dan kepuasan masyarakat menjadi tinggi karena dari observasi awal ditemukan pelayanan yang diberikan oleh kecamatan sangat kurang. Hal itu diakibatkan adanya pelayanan secara administrasi yang berbelit-belit sehingga tidak dapat mencerminkan pelayanan prima dan menghambat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Sari secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat memang merupakan suatu tujuan pemerintah dengan melihat sejauh mana keseriusan dalam mewujudkan tujuan pemerintah kecamatan khususnya untuk menjadikan masyarakat Gunung Sari sejahtera dan puas terhadap hasil pelayanan yang diterima masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Konsep Good Governance Di Pemerintah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat Penerapan Konsep Good Governance di Pemerintah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan Konsep Good Governance Di Pemerintah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat serta faktor penghambatnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan administrasi publik, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap system administrasi negara Indonesia, system politik Indonesia, kepemimpinan publik, peran camat, mewujudkan good governance bahkan menajamen sumber daya aparatur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diwilayah masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Good Governance*

Woodrow Wilson yang menjadi presiden Amerika Serikat ke-27, kira-kira 125 tahun yang lalu memperkenalkan bidang studi administrasi publik yang di dalamnya terdapat istilah *governance*. Istilah ini sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.

Wacana tentang *governance* dan pengertian yang hendak kita perbincangkan dan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolah pemerintahan, tata pamongbaru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan *good governance* sebagai prasyarat utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, istilah *good governance* menurut Bintoro Tjokroamindjojo telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah. Menurut UNDP tata pemerintahan yang baik. Menurut LAN ialah pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan sedangkan Kartini (2011:15) mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Lebih lanjut *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. Menurut Basri (2007:46) secara ringkas prinsip *good governance* antarlain adalah prinsip cepat tangkap (*responsif*), keadilan, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan asas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No.22 Tahun 1999 dan diperbaharui oleh UU No. 32 Tahun 2004, lahirkan pemerintahan local (*local government*) yang diberikewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi sedangkan pemerintahanya disebut *local government* atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah lokal dan pemerintah pusat hanya dalam hubungan pengawasan saja. *Local government* dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance*.

Tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. *United National Development Program* (UNDP) mendefenisikan *governance* sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelolaurusan-urusan Negara pada semua tingkat.

Dari definisi tersebut *governance* meliputi 3 domain yaitu negara (pemerintah), dunia usaha (swasta) dan masyarakat yang sering berinteraksi. Arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pemerintahan tersebut.

2.1.1 Indikator Kualitas Governance

Banyak pendekatan dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembaran *good governance*. Untuk mendekatinya dengan prinsip-prinsip, yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip *good governance*. Untuk mengemukakan Sembilan yakni prinsip-prinsip, yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, responsiveness, orientasi consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategic.

Ganie-Rochman seperti dikutip Syakrani dan Syahrani (2009:131) mengembangkan empat prinsip, yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi, dan transparansi. Lebih lanjut menurut Syakrani dan Syahrani (2009:132), Prinsip-prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bhatta yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Cara lain untuk mengukur tingkat

keberhasilan pelebangan konsep ini adalah dengan mengidentifikasi isu-isu. Menonjol di sekitar tantangan baru tersebut. Kaufman dkk (Dalam Syakrani dan Syahriani, 2009 : 132) mengemukakan lima isu penting, yaitu:

a. (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kemampuan member jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang Accountability terhadap suatu organisasi.

b. Political stability (stabilitas politik)

Stabilitas politik adalah gagasan bahwa lembaga pemerintah di pemerintah lokal, negara bagian atau federal memiliki kontrol dan bahwa hal-hal tampaknya menjadi stabil dan berjalan lancar.

c. Government effectiveness.

Adalah proses implementasi dalam menjalankan kinerja pemerintah dalam mengaplikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan baik.

d. Regulatory quality.

Merupakan cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu.

e. Control of corruption

Suatu aktivitas pengawasan dan pemantauan terhadap pendekteksian penyeleweangn anggaran yang dapat menguntungkan sepihak atau segolongan orang.

Huther dan shah (Dalam Syakrani dan Syahrani, 2009 : 132-133) mengembangkan konsep component of governance quality index, yang mencakup (a) indeks partisipasi warga Negara, (b) indeks orientasi pemerintah, (c) indeks pembangunan social, dan (d) indeks menejemen ekonomi. Laboratorium good governance provinsi kalimantan selatan mengembangkan dua Matrik indeks good governance yang merupakan hasil”perkawinan silang” antara prinsip-prinsip good governance dan isu-isu strategis.

2.1.2 Tahap Kinerja Good Governance

Tata-kelola pemerintahan yang sehat setidaknya secara konseptual Mengandung dua dimensi, yaitu dimensi substansial dan procedural. Secara substansial, konsep ini memiliki dua makna,yaitu gagasan besar dan perubahan. Yang pertama mengakut gambaran ideal yang ingin diwujudkan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan gambaran ideal itu harus diwujudkan. Simpulkan kedua makna bertemu pada gagsan *Maxwell* dan *covey* tentang *behavior matters*.

Dalam seluruh karyanya tentang kepemimpinan, teori *Maxwell* dapat dirangkum dalam dua simpul pemikiran , yaitu kekuatan tentang gagsan besar(the power-Of ideas) yaitu keseharian itu penting(*everyday matters*). Secara tidak langsung simpul pemikiran ini ingin mengemukakan, perubahan apa pun harus dimulai Dengan konstuksi gambaran ideal yang akan diwujudkan. Itulah gagasan besar Tetapi, gagasan besar ini akan menjadi utopia jika tidak ada aktivitas keseharian yang di kerjakan untuk mewujudkan gagasan besar itu.

Penerapan konsep tata-kelola pemerintahan yang sehat, menurut salah satu definisi, merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diimplementasi dan diukur.pada organisasi apapun, pengambilan keputusan yang bernuasa. Gagasan besar,seperti gagasan good governance, merupakan fungsi pemimpin puncak (top leader). Teori perubahan memang mengajarkan bahwa gagasan Perubahan bias berasal dari mana saja, tetapi tentu saja, gagasan yang diprakarsai oleh pemimpin puncak, yang merupakan terobosan-terobosan politik, apalagi di lingkungan birokrasi pemerintah, mempunyai pengaruh lebih signifikan Terhadap tingkat penerimaan implementasi. Di lingkungan ini, dengan kata lain, keinginan pemimpin puncak untuk melakukan perubahan seradikal apapun akan lebih diterima.

Konsep keinginan untuk melakukan perubahan di atas sudah mencakup Ketulusan pemimpin puncak untuk mengawal terlibat aktif dalam proses perubahan itu, khususnya dalam tahap-tahap awal proses perubahan. Teori-teori perubahan mutakhir mengemukakan, sebelum sebuah perubahan Melembaga, keterlibatan pemimpin puncak merupakan kunci keberhasilan.Bahkan, kesedian pemimpin puncak untuk mengawal perubahan menjadi salah satu indikator komitmen untuk melakukan perubahan.Selain itu, melibatkan aktif pemimpin puncak dibutuhkan untuk memastikan apakah gagasan perubahan tersebut memiliki dukungan administratif dari institusi pelaksana. Jika dukungan ini tersedia dalam jumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, maka rentang waktu keterlibatan aktif itu akan lebih pendek.

Sebaliknya, jika inersia dan patologi yang dialami oleh institusi pelaksana acute, maka rentang waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Intinya adalah bahwa keterlibatan itu akan diakhiri ketika institusi pelaksana mampu menghasilkan administrative best practices yang mendukung terwujudnya political breakthrough dan practices, yang biasanya di prakalsai oleh top manager. Dalam konteks implementasi konsep good governance di lingkungan birokrasi pemerintahan, rangkaian proses ini dapat divisualisasikan sebagai berikut.

2.2 Karakteristik Pemimpin Yang Efektif

Pemimpin/leader mempunyai macam-macam pengertian dari para ahli. Berikut ini terdapat beberapa definisi tentang pemimpin yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : Menurut Hasibuan (2011:157), pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Kartono (2010:18), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Menurut Henry Pratt Fairchild (dalam Kartono 2010:23) pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya

orang lain atau melalui kekuasaan dan posisi. Sebagaimana diungkapkan

Sedarmayanti (2009-119) bahwa pemimpin(leader) adalah :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan.
2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif: manajemen dan kepemimpinan.
3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan.
4. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada beberapa karakteristik pemimpin yang efektif. Karakteristik pemimpin merupakan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Ada empat karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (Sunindhia dan Widiyanti diacu dalam Hakiem 2003):

1. Pemimpin harus peka terhadap lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan nasehat dari orang-orang di sekitarnya.
2. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya.
3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, kepada organisasinya.

4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Teori kepemimpinan berdasarkan ciri (traits theory) memberi petunjuk tentang ciri-ciri pemimpin yaitu (Siagian, 2003):

1. Pengetahuan umum yang luas.
2. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.
3. Kemampuan analitik.
4. Sifat inkuisitif atau rasa ingin tahu.
5. Keterampilan berkomunikasi secara efektif.
6. Kemampuan menentukan skala prioritas.
7. Rasionalitas.
8. Keteladanan.
9. ketegasan.
10. Orientasi masa depan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pemimpin harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpin. Keahlian ini terlihat dari sifat, watak dan perilaku yang tercermin dalam setiap tindakan.

Secara umum seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik seperti (1) tanggung jawab seimbang, keseimbangan disini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut; (2) model peranan yang positif, peranan disini adalah tanggung jawab, perilaku, atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu; (3) memiliki keterampilan komunikasi yang baik, pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas, serta dengan cara yang tepat;

(4) memiliki pengaruh positif, pemimpin yang baik memiliki pengaruh terhadap karyawannya dan menggunakan pengaruh tersebut untuk hal-hal yang positif; (5) mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain terhadap sudut pandangnya serta mengarahkan mereka pada tanggung jawab total terhadap sudut pandang tersebut (Pulungan, 2001)

2.3 Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi

Berbagai pendapat dan definisi kepemimpinan muncul, sesuai dengan dari segi apa orang memandang segi kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administrative, dan persepsi lain-lain tentang legitimasi pengaruh (Wahjosumijo, 1999). Menurut Rich ad Hull (1999: 135), Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi pendapat, sikap dan perilaku orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mampu mengatur dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berfungsi sebagai pemimpin. Kepemimpinan (leadership) merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup bermasyarakat sesuai kodratnya bila mereka melepaskan diri dari ketergantungannya pada orang lain. Hidup bermasyarakat memerlukan pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat menentukan arah atau tujuan yang

dikehendaki, dan dengan cara bagaimana arah atau tujuan tersebut dapat dicapai. Kepemimpinan seseorang berperan berbagai penggerak dalam proses kerja sama antara manusia dalam organisasi termasuk sekolah. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan mengenai pengertian tentang kepemimpinan.

Menurut Paul Heresay dan Keneth H. Blanchard yang dikutip oleh Pandji Anoragan dalam bukunya Perilaku Keorganisasian, pemimpin adalah orang yang dapat mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu "(Pandji Anoraga, 1995:186).

Menurut Martin J. Gannon, sebagaimana dikutip oleh Pandji Anoraga, pemimpin adalah seorang atasan yang mempengaruhi perilaku bawahannya" Sedangkan menurut Kartini Kartono (1998:84), pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian saran- saran tertentu."

Dari definisi di atas jelas bahwa, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hirarki organisasi. Ia harus membuat perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan serta keputusan efektif. Pemimpin selalu melibatkan orang lain, Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dimana ada pemimpin maka disana ada pengikut yang harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan itu akan terjadi dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan seseorang berperan sebagai penggerak dalam proses kerja sama

antar manusia dalam organisasi termasuk sekolah. Berdasarkan pemikiran ini, maka harus dibedakan antara kepemimpinan dan manajemen. R.D. Agarwal sebagaimana dikutip Pandji Anoraga (1995: 186) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah "seni mempengaruhi orang lain untuk mengarahkan kemauan mereka".

Kemampuan dan usaha untuk mencapai tujuan pemimpin. Kepemimpinan menurut Hall digambarkan seperti suatu pemecahan yang sangat mudah terhadap gejala masalah dalam berorganisasi. Dengan kata lain tujuan kepemimpinan adalah mempengaruhi organisasi lain, dalam hal ini karyawan atau bawahan untuk mencapai misi perusahaan/organisasi. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti dari kepemimpinan sedang untuk mempengaruhi orang lain, pemimpin perlu mengetahui beberapa strategi antara lain:

- a. Menggunakan fakta dan data untuk mengemukakan dan alasan yang logis.
- b. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang ada dalam perusahaan.
- c. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan.
- d. Melakukan negosiasi.
- e. Menggunakan pendekatan langsung dan kalau terpaksa menggunakan kedudukan lebih tinggi dalam organisasi, dan
- f. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang.
- g. Sehubungan dengan yang telah diuraikan di atas jelas bahwa, kemampuan memimpin dan ketaatan pada pemimpin lebih banyak didasarkan pada gaya kepemimpinan yang ditunjukkan kepada pemimpin itu sendiri.

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya seorang pemimpin untuk mengatur dan bertanggung jawab atas jalannya suatu proses dalam organisasi tersebut. Figur pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memahami dan menyadari bahwa keteladanan yang diberikannya, berdaya pengaruh jauh lebih hebat dibandingkan bila ia hanya mengkhobahkannya, dan bisa menjadi

sebuah alat yang ampuh dan efektif yang mampu menunjang kinerja organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang memiliki wawasan pribadi untuk tumbuh bersama organisasi dan mengubah pandangan mereka sendiri, atau menyadari keterbatasan mereka dan memungkinkan bentuk kepemimpinan yang lain muncul. Organisasi yang terus berhasil akan memaksa pemimpin untuk memperhitungkan bagaimana cara menumbuhkan proses yang tadinya dapat bekerja dalam skala kecil dan dengan orang muda ke dalam proses yang berfungsi dalam skala global dengan karyawan yang makin matang. Untuk menciptakan dan menghidupkan suatu organisasi, diperlukan suatu visi, keyakinan dan energi yang kuat. Diperlukan suatu penilaian, kebajikan, dan berikut :

1. Jujur (honest),
2. Kompeten (competent),
3. Melihat ke depan (forward-looking),
4. Selalu memicu inspirasi (inspiring),
5. Pandai dan cerdas (intelligent),
6. Obyektif, berlaku adil (fair-minded),
7. Berwawasan luas (broadminded),
8. Berani mengambil resiko (courageous),
9. Tidak basa-basi, langsung pada persoalan (straightforward),
10. Penuh imajinasi (imaginative).

Perilaku Pemimpin Berbagai riset menunjukkan bahwa tipe kepemimpinan sangat bervariasi berdasarkan situasi yang dihadapi.

2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak disediakan swasta tersebut. Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Sedangkan di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun asas-asas pelayanan publik yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.

2. Kepastian hukum

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

3. Kesamaan hak

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

5. Keprofesionalan

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

6. Partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil

8. Keterbukaan

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9. Akuntabilitas

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu

Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan public adalah serangkaian proses atau usaha yang dilakukan perorangan maupun instansi publik untuk mencapai tujuan tertentu atau melaksanakan ketentuan perundang undangan.

Dalam hal tertentu yang krusial, tata-kelola pemerintahan yang sehat – good governance- merupakan konsep yang menghubungkan Negara dengan penduduk. Dalam laporannya yang bertajuk *making services work for poor people*, bank dunia (2004) mengemukakan, ketika fungsi pelayanan public di sebuah Negara berjalan dengan baik, maka sebenarnya yang mendapat kan manfaat bukan sekedar penduduk, tetapi juga pemerintah. Pernyataan ini mengandung banyak makna. Dua di antaranya adalah, pertama, keberfungsian pelayanan publik mengabarkan; (1) pemerintah mampu menyediakan pelayanan public sesuai dengan preferensi dan kebutuhan penduduk, (2) pemerintah mampu menyelenggarakan fungsi ini dengan mutu prima. Yang pertama menyakut the

ringht things, sedangkan yang kedua berkaitan dengan *do them ringht*. Konsep *the right* dalam konteks pelayanan publik mangandung makna yang krusial. Sekurang-kurangnya makna krusial ini dapat di gambarkan sebagai berikut.

Kemampuan menyediakan pelayanan publik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan penduduk melukiskan setidaknya-tidaknya dua hal: (1) terjadinya pergeseran mainset, kultur kerja, dari berorientasi pada diri sendiri fokus pada orang lain. Sesuatu yang tidak mudah, khususnya di lingkungan birokrasi yang terbiasa dengan kultur minta-dilayani; (2) terjadinya peningkatan kompetensi baik dalam melakukan need assensment, perencanaan dan targenting maupun dalam penyediaan pelayanan publik. Ini juga merupakan sesuatu yang sulit, juga pada birokrasi yang terbiasa tidak akrab dengan penduduk. Konsep *do them* dalam konteks yang sama juga menyediakan banyak nuansa. Yang paling jgelas adalah terjadinya pergeseran dari *kebiasaan do lees, spent more ke arah do more, spent less*. Secara teoretik, pergeseran ini menandai telah tercapainya pase *reinventing government* pada diri birokrasi pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 2) metode penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Camat Gunung Sari. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dengan pertimbangan kemudahan akses dan kemudahan untuk memperoleh data. Peneliti juga sudah sangat paham dan akrab dengan lokasi penelitian karena berdomisili di kecamatan tersebut. Sedangkan waktu penelitian mulai pengajuan judul sampai laporan hasil penelitian yang sekurangnya membutuhkan waktu 3 bulan.

3.3 Teknik Pemilihan Informan

Informan kunci (*key-informan*) berkaitan dengan tujuan penelitian ini diwilayah penelitian yaitu kecamatan gunung sari. Untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan teknik "*purposive sampling*", yaitu

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2009:85).

Menurut penulis informan dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Camat Kecamatan Gunung Sari
2. Sekretaris Kantor Camat Gunung Sari
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gunung Sari
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gunung Sari
5. Tokoh Masyarakat, Agama, Adanya yang ada di Kecamatan Gunung Sari

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data di bagi menjadi dua yaitu:

a. Data kualitatif

Menurut Meleong (2005:6) data kualitatif adalah jenis data yang berhubungan dengan nilai misalnya adanya pernyataan sebagai suatu keutuhan pada konteks dari suatu keutuhan tersebut.

b. Data kuantitatif

Menurut Arikunto (2002:93) mengatakan bahwa data yang bersifat kuantitatif adalah data yang berwujud berdasarkan data berangka hasil perhitungan pengukuran.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Menurut Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:55) mengatakan data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subyek (informan) melalui proses wawancara. Data primer ini merupakan data yang sangat urgen untuk kesuksesan penelitian maka dari itu data primer akan di peroleh di Kecamatan Gunung Sari, Baik itu yg berbentuk dokumen maupun yang dihasilkan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Bagong Suyanto dan Sutinah (2005:56) mengatakan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal sebagai data pendukung yang dapat digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan memperoleh data sekunder melalui surat kabar, majalah, media, jurnal dan lain sebagainya yang mendukung hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistinya. Yang melakukan validasi adalah peneliti

sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2013: 13).

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni, pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*).

1. Metode Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil (Riduwan, 2010: 57). Nasution (Dalam Sugiyono, 2013:). menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservai dengan jelas.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu dengan lawan bicara. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Bagong Suyanto & Sutinah. 2005: 69). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013: 231). Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013), jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara semiterstruktur. Jenis ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview. Berikut beberapa ciri dari wawancara semiterstruktur:

1. Pertanyaan lebih terbuka, akan tetapi ada batasan tema dan alur pembicaraan.
2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi.
3. Bersifat lebih fleksibel, tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan dan jawaban).
4. Ada pedoman wawancara yang akan menjadi patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata.

Tujuan dari wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Wawancara semiterstruktur disesuaikan dengan kondisi informan dan lokasi wawancara.

Dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2013:234).

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi Arikunto (2002:158) yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengabilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini dkk, 2009: 69).

Beberapa penjelasan di atas maka dalam penelitian ini akan di gunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan camat dalam mengujudkan good governance.

3.6 Teknik Analisis Data

Di karenakan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif maka teknik analisis data maka data yang akan diperoleh yaitu data kualitatif, yang di maksud untuk memperoleh gambaran secara khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang mencakup dalam permasalahan yang dilakukan di lokasi penelitian pada saat pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang di proleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan bahan lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di imformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai

pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai setelah melakukan analisis belum memuaskan. Kemudian peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai saat tertentu diperoleh data yang dianggap (Sugiyono, 2013:246). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersama dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data, yaitu kegiatan memilih data dan menyederhananya dari data kasarnya dan memberikan kode pada data di analisis. Dimana semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data, sejalan dengan pendapat Arikunto (2008: 174). mengatakan Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Dimana semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, dan kompleks dan rumit. Oleh karena itu kita perlu mereduksi data untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan poalnya. Dengan demikian data mbaran yang lebih yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.

2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk data-data atau kalimat yang dapat dimengerti. Dalam penelitian ini peneliti dapat memilah data yang bias menjawab masalah yang diteliti. Dengan penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang jadi titik masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui di lapangan dengan melakukan pencatatan peraturan. Pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan akan menjadi suatu kesimpulan. Aktivitas penelitian yang dilakukan merupakan suatu proses siklus diantaranya komponen-komponen tersebut, sehingga data yang didapatkan benar-benar mewakili sesuai konteks masalah yang diteliti.

Gambar diagram alur dari analisis data

